

## Siaran Pers

### **Direktur IESR: Potong Anggaran di Kementerian ESDM, Pemerintah Tidak Serius Mengembangkan Energi Terbarukan dan Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional**

Jakarta, 5 Agustus 2016

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berencana memotong anggaran sebesar Rp. 900 Miliar. Berdasarkan informasi, pemotongan terbesar akan dilakukan pada Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).

Pemotongan pada Ditjen EBTKE ini mencakup tiga kegiatan yaitu : pemasangan solar rooftop pada bandara, sosialisasi program potong 10% dan Program Indonesia Terang (PIT).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyatakan pemotongan anggaran pada proyek energi terbarukan dan konservasi energi menunjukkan bahwa Menteri ESDM yang baru tidak berpihak dan abai pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Dikhawatirkan, tindakan ini akan memberikan sinyal negatif kepada pelaku usaha dan investor serta mitra pembangunan mengenai keseriusan pemerintah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan.

Sesuai Kebijakan Energi Nasional, pengembangan energi terbarukan diharapkan mencapai 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025, dari 5% pada saat ini. Untuk mencapai target yang ambisius ini, diperlukan stimulus dana publik dan instrumen kebijakan lain untuk menarik minat investasi.

Menurut Fabby, pemotongan anggaran untuk sosialisasi Program Indonesia Terang (PIT) dipastikan juga akan menghambat pelaksanaan PIT ke depan. Sebelumnya, KESDM telah merancang 4 tahap program PIT dimana tahap pertama, berupa persiapan program, termasuk sosialisasi ke Pemda yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2016. Tahap persiapan ini sangat krusial untuk mendapatkan dukungan Pemda di provinsi dan kabupaten kota di Indonesia Timur, termasuk persiapan lokasi, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah yang bisa terlibat dalam program ini.

Pemotongan anggaran untuk PIT juga dapat berdampak pada kinerja KESDM dan menghambat prioritas Presiden dalam hal meningkatkan akses dan pelayanan listrik. RPJMN menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 96% pada tahun 2019. Penundangan pelaksanaan PIT akan berdampak pada penyediaan listrik di 12,600

desa yang menjadi sasaran, dimana setidaknya ada 2 juta rumah yang tangga yang hingga saat masih dalam keadaan gelap gulita dan belum mendapatkan layanan listrik

Pemotongan anggaran sosialisasi "Gerakan Potong 10%" juga dapat menghilangkan momentum penghematan energi yang sedang dibangun oleh KESDM. Sosialisasi yang luas kepada Pemda dapat mendorong penghematan energi pada fasilitas publik, yang dapat berakibat pada penghematan anggaran untuk biaya energi.

Fabby Tumiwa menekankan agar Menteri ESDM dapat memberikan arahan yang tegas kepada jajarannya dalam memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Menteri ESDM juga diharapkan mendukung implementasi regulasi energi terbarukan, misalnya Permen 19/2016, serta insentif untuk energi terbarukan dan konservasi energi.

####

#### **Tentang IESR**

Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang Energi dan Perubahan Iklim, dan dijabarkan dalam tiga program: Akses untuk Energi, Perubahan Iklim dan Reformasi Industri Ekstraktif. Berdiri resmi di tahun 2007, IESR bergerak sebagai lembaga pemikir (think tank) bagi masyarakat sipil yang secara aktif menginspirasi, mendorong, dan mendukung perubahan-perubahan ke arah keadilan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan manusia.

#### **Kontak media:**

Yesi Maryam  
yesi@iesr.or.id  
081212470477